



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 318/188.4.5/TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan, pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipadangan perlu untuk membuka rekening kas bendaharan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Biak Numfor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kulusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Penggantian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah nengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

20. Peraturan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Nomor (Berita Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun 2016 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Nomor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 1 Tahun 2020);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Nomor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Nomor Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Nomor Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang tersebar pada Bank Milik Pemerintah maupun Swasta yang beroperasi dan berada dalam Wilayah Kabupaten Biak Numfor.
- KETIGA : Penetapan Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, harus berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Biak Numfor.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 11 Oktober 2021

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004

Salinan keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, di Jayapura;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, di Jayapura
3. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIAK MUMFOR
 NOMOR : 318/189.1.5/ TAHUN 2021
 TANGGAL : 11 OKTOBER TAHUN 2021

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	NOMOR REKENING	NAMA AGENING
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5000106006021	Bend Rutin Dinas Pendidikan Kab Biak
2.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5000106006043	Bend Gaji Dinas Pendidikan
3.	Sanggar Kegiatan Belajar	5000106006766	Sanggar Kegiatan Belajar/Bendahara Gaji
4.	Dinas Kesehatan	5000106001642	Bend Pengeluaran Dimka Biak
5.	Dinas Kesehatan	5000106001902	Bend Gaji Dinas Kabupaten Biak
6.	Rumah Sakit Umum Daerah	5000106001721	Bend Rutin/ RSUD Biak
7.	Rumah Sakit Umum Daerah	5000106001914	RSUD/Bend Gaji
8.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5000106008878	OPU/Bendahara Rutin
9.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5000106000247	DPU/Bend Gaji
10.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	5000106000505	Bend Rutin Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab Biak Mumfor
11.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	5000106000256	Bend Gaji Dinas Perumahan& K
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	5000106007091	Bend Peng Batuan Polisi Pamong Praja
13.	Satuan Polisi Pamong Praja	5000106009019	Satpol Pp / Bend Gaji
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5000106008349	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5000106008431	Bendahara Gaji Bpbd
16.	Dinas Sosial	5000106001628	Bend Rutin Dinas Kesejahteraan Sosial
17.	Dinas Sosial	5000106008193	Bend Gaji Dinas Kes Sosial
18.	Dinas Tenaga Kerja	5000106005052	Dinas Tenaga Kerja Bend Rutin

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
19.	Dinas Tenaga Kerja	5000106001037	Dinas Tenaga Kerja Bend Gaji
20.	Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah	5000106001045	KU LK-UKM Bend Rutin
21.	Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah	5000106003969	LLK UKM Biak Bendahara Gaji
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	5000106001691	Bend Rutin Dp3akb
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	5000106009021	Bend Gaji Dp3akb Biak
24.	Dinas Lingkungan Hidup	5000106008954	Bend Rutin Dlh Biak
25.	Dinas Lingkungan Hidup	5000106008866	Dinas Lingkungan Hidup Bend Gaji
26.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5000106001252	Kependudukan & Catatan Sipil
27.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5000106004484	Bend Gaji Dinas Duksepi
28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	5000106005063	Bend Rutin Dp3mk Biak
29.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	50001060061094	Bend Gaji Dp3mk
30.	Dinas Perhubungan	5000106000788	Bend Rutin Dinas Perhubungan Kab Diak Nu
31.	Dinas Perhubungan	5000106000492	Dinas Perhubungan Biak/Bend Gaji
32.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5000106001321	Bend Rutin/Dinas Informasi Dan Komunikasi
33.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5000106000681	Bend Gaji Dinas Infokom
34.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	5000106004425	Bend Rutin Dinas Koperasi & Uku
35.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	5000106001313	Bend Gaji Dinas Koperasi
36.	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5000106000573	Dinas Penanaman Mptap Rutin
37.	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5000106000562	Dinas Penanaman Mptap Gaji

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
38.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	5000106009317	Bend Rutin Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab Blak Nomor
39.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	5000106000481	Bend Gaji Dispora
40.	Dinas Perikanan	5000106003327	Dinas Perikanan / Bend Rutin
41.	Dinas Perikanan	5000106000302	Bend Gaji Dinas Perikanan Blak
42.	Dinas Pariwisata	5000106005181	Bend Rutin Dinas Pariwisata
43.	Dinas Pariwisata	5000106000399	Bend Gaji Dinas Pariwisata Kebudayaan
44.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	5000106002622	Bend Rutin Dinas Pertanian
45.	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	5000106008015	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Gaji
46.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5000106007394	Dinas Perindag / Bend Rutin
47.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5000106001082	Dinas Perindag Bend Gaji
48.	Sekretariat Daerah	5000106006523	Bend Rutin Setda Kab Blak
49.	Sekretariat Daerah	5000106000182	Bend Gaji Setda Blak Nomor
50.	Bagian Umum	5000106006523	Bend Rutin Setda Kab Blak
51.	Bagian Administrasi Pembangunan	5000106006523	Bend Rutin Setda Kab Blak
52.	Bagian Organisasi	5000106006523	Bend Rutin Setda Kab Blak
53.	Bagian Perencanaan	5000106006523	Bend Rutin Setda Kab Blak
54.	Bagian Pengelolaan Perpustakaan Dan Arsip Daerah	5000106006523	Bend Rutin Setda Kab Blak
55.	Bagian Hukum	5000106006523	Bend Rutin Setda Kab Blak
56.	Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	5000106006523	Bend Rutin Setda Kab Blak

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
57.	Bagian Humas Dan Protokol	5000106006523	Bend Rutin Senda Kab Biak
58.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5000106006523	Bend Rutin Setda Kab Biak
59.	Bagian Tata Pemerintahan	5000106006523	Bend Rutin Setda Kab Biak
60.	Sekretariat Dewan	5000106001896	Bend Gaji Sekretariat
61.	Sekretariat Dewan	5000106006006	Bend Rutin Dped Kab Biak
62.	Inspektoral	5000106000228	Bend Rutin/Inspektoral Biak
63.	Inspektarat	5000106000212	Inspektoral Kab Biak Numkor
64.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5000106005075	Bend Rutin Bapperta Biak
65.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5000106000235	Bend Gaji Bapperta
66.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5000106007667	Bend Pengeluaran Bpkad Biak
67.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	5000106007541	Bend Gaji Bpkad Kab Biak
68.	Badan Pendapatan Daerah	5000106001859	Bend Utang Dispenda Tk Binum
69.	Badan Pendapatan Daerah	5000106001861	Bend Gaji Dispenda Biak
70.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	5000106007643	Bend Rutin Badan Kepegawaian Daerah
71.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	5000106007473	Bend Gaji Bkpadm Biak
72.	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	5000106001291	Bend Rutin Kesbang Dan Linmas
73.	Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat	5000106001009	Bend Gaji Kesbang Linmas
74.	Distrik Biak Kota	5000106008178	Bend Rutin Distrik Biak Kota
75.	Distrik Biak Kota	5000106000314	Distrik Biak Kota/Bend Gaji
76.	Distrik Samafa	5000106009032	Bend Rutin Distrik Samafa

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
77.	Distrik Samofa	5000106000651	Bend Gaji Distrik Samofa
78.	Distrik Yendidori	5000106001689	Bend Rutin Distrik Yendidori
79.	Distrik Yendihori	5000106000662	Bend Gaji Distrik Yendidori
80.	Distrik Biak Timur	5000106005117	Bend Rutin Distrik Biak Timur
81.	Distrik Biak Timur	5000106001872	Bend Gaji Distrik Biak Timur
82.	Distrik Padado	5000106001653	Bend Rutin Distrik Padado
83.	Distrik Padado	5000106002815	Distrik Padado/Bend Gaji
84.	Distrik Biak Utara	5000106005105	Bend Rutin Distrik Biak Utara
85.	Distrik Biak Utara	5000106000261	Bend Gaji Distrik Biak Utara
86.	Distrik Waras	5000106005844	Bend Rutin Distrik Waras
87.	Distrik Waras	5000106000685	Distrik Waras Bend Gaji
88.	Distrik Biak Barat	5000106005464	Bend Rutin Distrik Biak Barat
89.	Distrik Biak Barat	5000106000284	Bend Gaji Distrik Biak Barat
90.	Distrik Numfor Barat	5000106005737	Bend Rutin Distrik Numfor Barat
91.	Distrik Numfor Barat	5000106000272	Bend Gaji Distrik Numfor Barat
92.	Distrik Numfor Timur	5000106001616	Bend Rutin Distrik Numfor Timur
93.	Distrik Numfor Timur	5000105001684	Distrik Numfor Timur/Bend Gaji
94.	Distrik Bondifuar	5000106007412	Distrik Bondifuar/Bend Rutin
95.	Distrik Bondifuar	5000106006039	Distrik Bondifuar /Bend Gaji
96.	Distrik Yawosai	5000106007758	Bendahara Rutin Distrik Yawosai

NO.	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
97.	Distrik Yawos	5000106007942	Bend Gaji Distrik Yawos
98.	Distrik Andey	5000106007485	Bend Rutin Distrik Andey
99.	Distrik Andey	5000106007795	Bend Gaji Distrik Andey
100.	Distrik Swandiwe	5000106007734	Bend Peng Distrik Swandiwe
101.	Distrik Swandiwe	5000106007989	Bend Gaji Distrik Swandiwe
102.	Distrik Bruyadani	5000106007448	Distrik Bruyadani
103.	Distrik Bruyadani	5000106008027	Bend Gaji Distrik Bruyadani
104.	Distrik Orkeri	5000106007424	Distrik Orkeri/Bend Rutin
105.	Distrik Orkeri	5000106007783	Distrik Orkeri Mfr Timur/Gaji
106.	Distrik Paura	5000106007436	Distrik Paura
107.	Distrik Paura	5000106007802	Bendahara Gaji Distrik Paura Numfor
108.	Distrik Aimando	5000106007497	Distrik Aimando Padaida
109.	Distrik Aimando	5000106007931	Bend Gaji Distrik Aimando
110.	Distrik Oridek	5000106007451	Bend Rutin Distrik Oridek
111.	Distrik Oridek	5000106007977	Bend Gaji Distrik Oridek
112.	Kelurahan Pandot	5000106005178	Bend Rutin Distrik Blak Kota
113.	Kelurahan Durokub	5000106005178	Bend Rutin Distrik Blak Kota
114.	Kelurahan Waupawut	5000106005178	Bend Rutin Distrik Blak Kota

NO.	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
115.	Kelurahan Mandala	5000106005178	Bend Rutin Distrik Biak Kota
116.	Kelurahan Saramom	5000106005178	Bend Rutin Distrik Biak Kota
117.	Kelurahan Yenures	5000106005178	Bend Rutin Distrik Biak Kota
118.	Kelurahan Sorido	5000106005178	Bend Rutin Distrik Biak Kota
119.	Kelurahan Brambaken	5000106009032	Bend Rutin Distrik Samofa
120.	Kelurahan Karang Mulia	5000106009032	Bend Rutin Distrik amofa
121.	Kelurahan Samofa	5000106009032	Bend Rutin Distrik Samofa
122.	Kelurahan Snerbo	5000106009032	Bend Rutin Distrik Samofa
123.	Kelurahan Mansinyas	5000106009032	Bend Rutin Distrik Samofa
124.	Kelurahan Yafdas	5000106009032	Bend Rutin Distrik Samofa
125.	Kelurahan Anjareuw	5000106009032	Bend Rutin Distrik Samofa

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004